



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS AIRLANGGA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **WISNU WIBOWO**
2. Jabatan : **WAKIL DEKAN I**
3. NHK : **855607**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **2.157.595.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 81 m2/165 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 490.050.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 1260 m2/96 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, WARISAN Rp. 363.825.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/36 m2 di KAB / KOTA GRESIK, HASIL SENDIRI Rp. 862.730.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/32 m2 di KAB / KOTA GRESIK, HASIL SENDIRI Rp. 440.990.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **168.650.000**

1. MOTOR, HONDA D1B02N13L2 A/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOTOR, HONDA BRV-EM/T/MPV Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 128.000.000
3. MOTOR, HONDA H1BO2N42L0 Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 15.150.000
4. MOTOR, HONDA L1F02N36L1 A/T Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 21.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **17.875.000**

D. SURAT BERHARGA Rp. **----**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **28.156.229**

F. HARTA LAINNYA Rp. **----**

Sub Total Rp. **2.372.276.229**



III. HUTANG

Rp. 798.097.468

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.574.178.761

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.